

KEBIJAKAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DALAM MENGEMBANGKAN USAHA KECIL DI KABUPATEN FAKFAK

Nur Hidayah

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asy-Syafi'iyah Fakfak

Abstract: *This study aims to determine the distribution of KUR policies in developing small businesses in Fakfak Regency. The results showed that (1) the implementation of the KUR program was understood as an action taken through the mechanism of channeling KUR from the government, then the credit guarantee company, then the implementing bank, and finally to the UKM actors. The implementation of the KUR program has succeeded in helping improve the ability of people who have business embryos to utilize their businesses to improve their welfare. The Implementation process is in the form of stages of submission of KUR, namely the prospective debtor makes a loan application, then the bank conducts a credit review and analysis (inspection stage), then grants the decision and disbursement of credit. (2) the lack of socialization carried out by the regional government both at the sub-district level and at related agencies can actually further optimize the KUR program that is currently running. It's just that this is not done well by the government. (3) the minimal role of local governments in the implementation of the KUR program often KUR customers, especially business actors apply for loans without the local government knowing. Whereas based on the purpose of the KUR program, one of which is to improve the economy in the regions by empowering micro and small businesses in an effort to prioritize the potential of their respective regions. (4) KUR distribution is not yet fully on target. Period 2018 results of BRI Internal Audit that there are 15 KUR disbursements that are not on target (BRI Internal Audit Source). KUR distribution is mostly absorbed not for the productive business sector, as used not as an additional productive business capital. This actually makes the KUR program less optimally felt by business actors.*

Keywords: *lending policy, small business development*

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, demikian halnya dengan tujuan dibentuknya negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 dinyatakan bahwa

tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintah telah dibuat dan diimplementasikan di daerah-daerah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri. Salah satu program pemerintah yaitu pembangunan perekonomian masyarakat yang didorong adanya program promasyarakat.

Dalam mewujudkan program perekonomian masyarakat maka perlu adanya managerial dari pemerintah, agar program yang diluncurkan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga perlu adanya sarana pengontrol yang berbasis kemajuan perekonomian masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan modal dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan perekonomian bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan perekonomian masyarakat.

Permasalahan perekonomian memang selalu menjadi warisan dari pendahulu yang masih belum bisa teratasi dengan baik. Berbagai program penanggulangan sudah dicoba namun belum bisa memperbaikinya. Mulai dari program peningkatan infrastruktur, pembiayaan sektor produktif dan sektor konsumtif seperti subsidi listrik dan BBM belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Seluruh program masih belum menyentuh akar rumput permasalahannya, sebab masih ada program yang tidak efektif, oknum tidak bertanggung jawab serta penyaluran yang cukup efektif jika prosedurnya mudah dan tepat sasaran. Namun ada sebuah program yang cukup efektif yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program ini berupa pembiayaan/pendanaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan menengah.

Kredit Usaha rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada investor yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR diberikan kepada UMKM-K (usaha mikro kecil menengah dan koperasi) yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang potensial, kemampuan untuk memperoleh keuntungan serta memiliki kemampuan untuk mengembalikan (Dana kredit), namun belum memiliki persyaratan yang layak untuk meminjam bank {Produk pinjaman bank, bukan KUR}.

KUR dapat diakses melalui bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dalam penyaluran seperti BNI, BRI, Mandiri. Bank Syariah Mandiri, BTN, BUKOPIN, Adapun bank-bank lain yang sudah diberi persetujuan pemerintah dalam menyalurkan KUR seperti Bank Jateng, Bank Jatim, BCA, Maybank, bahkan lembaga non bank seperti Adira dan FIF. Sasaran KUR adalah usaha yang bergerak di sektor usaha produktif, terutama pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam serta perdagangan kecil. Skema pembiayaan KUR seluruhnya ditanggung oleh Bank Pelaksana. Sedangkan pemerintah melalui PT.Askrindo dan Perum Jamkrindo menjamin resiko 70% dan Bank pelaksana hanya 30%.

Tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K). Penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, Pemberdayaan dan pengembanganUMKM-K meliputi: (1) peningkatan akses pada sumber pembiayaan, (2) pengembangan kewirausahaan, (3) peningkatan pasar produk UMKMK, (4) reformasi regulasi UMKMK.

Mekanisme penyaluran KUR memang dilakukan bisa di setiap bank pelaksana. Dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan, KUR sejatinya adalah program milik pemerintah yang dalam pelaksanaannya harus ditaati oleh bank pelaksana KUR sendiri. Artinya secara umum syarat dan ketentuan tidak berbeda, karena mengikuti peraturan kredit usaha rakyat yang dijadikan landasan hukum oleh pemerintah.

Proses penyaluran KUR kepada UMKM-K selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Banyak faktor penyebab yang membuat penyaluran KUR kurang maksimal,. Berdasarkan temuan dari LIPI program KUR yang seharusnya memberikan manfaat besar kepada perbankan dan perusahaan penjamin tetapi kontribusi dalam pengentasan kemiskinan lamban. Hal ini disebabkan karena umumnya penyalur dana KUR, hanya sebagai penyalur. Tidak menyediakan pihak khusus untuk memantau perkembangan pengguna KUR nasabah dan tidak memberi bimbingan kepada penerima KUR, sehingga pengguna dana tidak mengembangkan usaha, bahkan tidak digunakan untuk usaha.

Sejak dimulainya program KUR pada November 2007 sampai pada Juli 2018, diketahui bahwa total realisasi kredit dari program KUR secara nasional yang dikelola oleh Komite KUR telah mencapai sekitar kurang lebih Rp. 64.624.336 Triliun dengan total debitur mencapai 2.454.873 jiwa. Dari angka tersebut, diketahui bahwa Bank BRI memiliki plafon kredit terbesar yaitu mencapai Rp. 44.514.385 triliun (sumber: Komite KUR 2018). Kabupaten Fakfak, nasabah KUR Khususnya BRI Unit Thumburuni pada 5 tahun terakhir mencapai 1.894 debitur dan dana yang sudah disalurkan untuk KUR sebanyak Rp 36.368.500 milyar. Penyaluran tersebut digunakan untuk membantu warga dalam menopang usaha mereka, seperti usaha pala dan rumput laut.

Berdasarkan (Hasil wawancara dengan Ibu Afni petugas KUR): Maka terungkap bahwa kendala yang ditemukan dalam penyaluran KUR di BRI Unit Thumburuni adalah: (1) koneksi jaringan yang buruk sehingga pengiriman data ke SKIP terganggu usaha nasabah belum produktif seperti usahanya belum berjalan minimal 6 bulan sesuai prosedur KUR, (2) lokasi usaha nasabah yang jauh sehingga sulit untuk petugas menjangkau tempat usaha, (3) legalitas usaha yang tidak jelas, ditemukan adanya nasabah yang mengajukan KUR untuk kepentingan usaha orang lain, (4) riwayat pinjaman lama masuk dalam kategori daftar hitam

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Setelah mengetahui definisi tentang kebijakan dan publik, maka pada bagian ini peneliti membahas tentang definisi kebijakan publik, Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (dalam Nugroho 2003:4) sering dirumuskan kedalam definisi yang sederhana yaitu sebagai segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi sehingga definisi kebijakan publik diatas yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan atau yang dilaksanakan menjadi kurang tepat.

Menurut Nugroho (2003:4) kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan keadaan pola ketergantungan. Dimana kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan, visi dan misi bersama yang telah disepakati. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yaitu dicita-citakan.

Dengan demikian, dari beberapa pengertian kebijakan publik dan dengan mengikuti paham bahwa kebijakan publik itu harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik itu adalah rangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Implementasi Kebijakan

Dalam hal membuat kebijakan publik memang tidak semudah membalik telapak tangan, perlu dilakukan sebuah analisis yang komprehensif. Perumusan kebijakan adalah tahapan untuk menjawab terhadap sejumlah pertanyaan “apa”, yakni: apa rencana untuk menyelesaikan masalah? Apa yang menjadi tujuan dan prioritas? Pilihan apa yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut? Apa terkait dengan setiap alternatif?”

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson 1975:57), Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Evaluasi mencakup kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka terdapat dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan *derivate* atau aturan dari kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, yakni menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Kredit Usaha Rakyat

KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukan bagi Usaha Kecil Menengah dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak (*feasible*) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang diterapkan Perbankan (belum *bankable*). KUR merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai dibawah 5 (lima) juta rupiah dengan pola penjaminan oleh Pemerintah dengan besarnya *coverage* penjaminan maksimal 70% dari plafon kredit Lembaga Penjaminannya PT.Jamkrindo dan PT.Askrindo.

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut: (a) mempercepat proses pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), (b) meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM & Koperasi kepada Lembaga Keuangan, (c) sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Penyaluran KUR diatur berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 14 dijelaskan mengenai jenis penyaluran KUR sebagai berikut : *pertama*, KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri atas: KUR mikro; KUR kecil; KUR penempatan tenaga kerja Indonesia;

dan KUR khusus. *Kedua*, penyaluran KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Sektor Produksi yaitu sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor jasa produksi. *Ketiga*, penyaluran KUR pada Sektor Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi porsi penyaluran KUR Sektor Produksi paling sedikit mencapai target porsi penyaluran yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam forum rapat koordinasi. *Keempat*, penyalur KUR dapat memberikan kredit/pembiayaan multisektor kepada calon penerima yang memiliki usaha lebih dari satu sektor usaha namun dengan porsi pembiayaan paling banyak kepada Sektor Produksi, dengan menggunakan 1 (satu) akad kredit/pembiayaan. *Kelima*, pencatatan penyaluran KUR pada sektor usaha yang dominan dibiayai oleh KUR dilakukan berdasarkan pemberian kredit/pembiayaan multisektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

METODE

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara *ilmiah* berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional, empiris* Dan *sistematis*. *Rasional* berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, *Empiris* berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengenali dan mengetahui cara-cara yang digunakan. *Sistematis* artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Data yang diperoleh melalui penelitian ini adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data mendalam, suatu data yang mengandung makna atau data yang sebenarnya. Penelitian kualitatif ini juga tidak semata-mata mencari kebenaran, tetapi pada pemahaman peneliti terhadap apa yang diteliti.

Menurut Burgess dalam Nasution (1988:17), metode penelitian kualitatif bukan satu metode khusus melainkan meliputi berbagai metode yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang dihasilkan

berbentuk kata, kalimat dan gambar untuk mengeksplorasi bagaimana fenomena sosial yang terjadi.

Data Penelitian

Kabupaten Fakfak, program KUR sangat diminati warga masyarakat, karena dengan adanya KUR ini dapat membantu perekonomian warga Kabupaten Fakfak dalam berusaha. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari BRI Unit Thumburuni Kelurahan Fakfak Selatan Kabupaten Fakfak dari tahun 2016 sampai pada tahun 2018 di Kabupaten Fakfak memiliki jumlah debitur dan dana tersalurkan sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Debitur dan Dana yang telah disalurkan di BRI Unit Thumburuni
Kelurahan Fakfak Selatan Kabupaten Fakfak
Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Debitur	Dana Tersalurkan
2016	478	11.085.500.000,00
2017	345	7.434.000.000.00
2018	170	3.777.000.000,00
Jumlah	993	22.296.500.000.00

Sumber : Data BRI Unit Thumburuni Kab.Fakfak Tahun 2018

Dari tabel di atas jumlah Debitur dan Dana Tersalurkan di Kabupaten Fakfak berjumlah 993 debitur dan Dana yang sudah disalurkan sebanyak RP.22.296.500.000, yang terdata termasuk kredit yang lunas dan macet (*black list*). Penentuan informannya menggunakan teknik *purposive* (bertujuan), Teknik *purposive* adalah teknik penentuan informan yang mengetahui secara jelas dan tepat informasi mengenai masalah dalam penelitian ini. Menurut Bungin (2007:53), penentuan informan yang terpenting dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana menentukan *key informan* (informan kunci) atau situasi sosial tertentu yang syarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.

Tabel 2
Tabel Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Unit BRI Unit Thumburuni	1	<i>Key Informan</i>
2	Mantri KUR BRI Unit Thumburuni	3	<i>Key Informan</i>
3	Pelaku Penerima KUR	4	<i>Key Informan</i>
4	Pelaku Bukan Penerima KUR	3	<i>Key Informan</i>

Sumber: Hasil Analisis Konsep Peneliti

Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini instrument penelitian yang digunakan ialah peneliti sendiri, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, dan pelapor hasil penelitiannya. Menurut Irawan (2006:17) satu-satunya instrument terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Nasution dalam Sugiyono (2008:223) menyebutkan alasan manusia sebagai instrument penelitian utama: Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, sehingga dalam penelitian ini, peneliti harus bersifat netral agar penelitian yang dihasilkan tidak bersifat subjektif. Dengan demikian, posisi peneliti sangat penting karena sebagai instrument penelitian. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, seperti wawancara dan observasi. Sedangkan, data sekunder adalah data yang telah tersedia dan diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder ini dijadikan sebagai data tambahan untuk memperkuat penelitian, seperti dokumen, peraturan daerah, gambar, rekaman, dan lain-lain. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data berupa panduan wawancara, buku catatan, dan *handpone* untuk mengambil gambar atau foto dan untuk merekam hasil wawancara.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi dari beberapa teknik, yaitu: wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*indept interview*) karena peneliti dapat menjelaskan pertanyaan yang tidak dimengerti responden, peneliti dapat mengajukan pertanyaan, informan cenderung menjawab apabila diberi pertanyaan, dan informan dapat menceritakan sesuatu yang terjadi di

masa silam dan masa mendatang. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur.

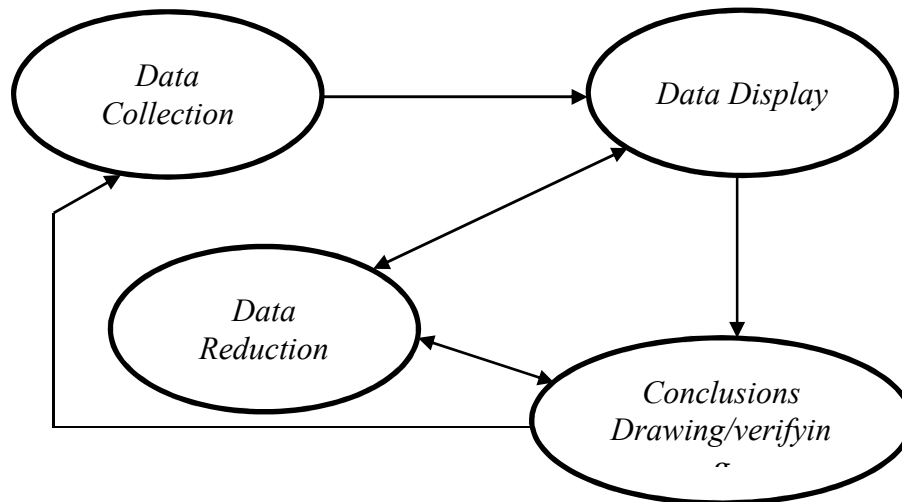
Dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data sekunder. Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Adapun studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik penumpukan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2010:248), yaitu : analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan dan bahan-bahan lain yang anda dapatkan, yang kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda (terhadap suatu fenomena) dan membantu anda untuk mempresentasikan penemuan anda kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa data, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Menurut Milles dan Huberman, aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, Model interaktif dalam analisis data menurut kedua tokoh tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1
Komponen Dalam Analisis Data (*Interactive Model*)



Sumber: Miles dan Huberman, (2009:20)

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, perumusan, perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data membantu membeikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam sebuah penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun pada penelitian ini, penyajian data yang peneliti lakukan dalm penelitian ini adalah bentuk teks narasi, hal ini seperti yang dikatakan oleh Miles & Huberman (2009:17): “*the most frequent from display data for qualitative research data ini the past has been narrative text*” (yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif).”

3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah ketiga dalam tahapan analisis interaktif menurut Miles & Huberman (2009:18-21) adalah “penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.”

Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data

Menurut Sugiyono (2010:267), validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Reliabilitas dalam penelitian kualitatif sangat berbeda dengan yang terdapat pada penelitian kuantitatif. Bila dalam penelitian kuantitatif reliabilitas berkenaan dengan konsistensi data, dimana bila terdapat peneliti yang melakukan penelitian pada obyek yang sama, maka akan mendapatkan data yang sama. Maka dalam penelitian kualitatif tidak demikian, suatu realitas (*social situation*) bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada data yang bersifat konsisten dan berulang seperti semula. Adapun untuk pengujian keabsahan datanya, pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu triangulasi dan membercheck.

Menurut Irawan (2006:76), secara sederhananya triangulasi adalah “proses *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa terjadi. Pertama, satu sumber cocok (senada, koheren) dengan sumber lain. Kedua, satu sumber data berbeda dari sumber lain, tetapi tidak harus berarti bertentangan. Ketiga, satu sumber 180° bertolak belakang dengan sumber lain.”

HASIL

Hasil penelitian merupakan penerapan data dan informasi yang peneliti dapatkan dari lapangan yang kemudian disesuaikan dengan *grand theory* yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Teori implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model teori implementasi yang dipaparkan oleh Merilee S. Griendle (1980). Model ini memaparkan bahwa, implementasi kebijakan ditentukan oleh 2 faktor yaitu: isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasinya (*context of policy*). Ide dasarnya dari teori ini adalah bahwa setelah kebijakan dilaksanakan, maka kebijakan bisa dilihat keberhasilannya yang ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

Adapun isi kebijakannya mencakup: (i) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; (ii) Jenis manfaat yang akan dihasilkan; (iii) Derajat perubahan yang diinginkan; (iv) Kedudukan pembuat kebijakan; (v) Siapa pelaksana program; serta (vi) Sumberdaya yang dikerahkan. Sedangkan konteks implementasinya mencakup : (i) *Power, Interens and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat); (ii) *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa); serta (iii) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

A. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Bagaimana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan serta mempengaruhi isi kebijakan. Bahwa kebijakan KUR dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kemudahan pelaku usaha kecil mengakses pembiayaan permodalan.

Kebijakan Program KUR tepat sasaran

Berdasarkan wawancara dengan informan, diketahui bahwa penyaluran pembiayaan KUR sudah tepat sasaran karena didasarkan pada penegakan aturan dan SOP yang sudah ditetapkan. Akan tetapi dari hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa penyaluran dana KUR belum sepenuhnya tepat sasaran. Pada periode 2018 ada sekitar 15 penyaluran KUR yang tidak tepat sasaran (Sumber: Audit Internal BRI). Sementara dari hasil observasi lapangan yang peneliti lakukan, penyaluran KUR banyak dinikmati justru bukan oleh pelaku usaha kecil. Penyaluran KUR banyak diserap bukan untuk membiayai sektor usaha produktif. Pengawasan yang dilakukan baik dari Unit maupun Cabang Bank Penyalur KUR sangat kurang. Sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang menyebabkan penyaluran KUR tidak tepat sasaran, misalnya setelah dana KUR tersebut sudah disalurkan dari pihak bank tidak melakukan pengawasan sampai proses pengambilan KUR itu selesai. Apabila pelaku penerima KUR ingin melanjutkan pengajuan KUR baru dilakukan OTS (*On The Spot*) untuk memastikan dana KUR tersebut digunakan dengan semestinya atau sebaliknya. Apabila tidak maka proses pengajuan KUR dengan otomatis tidak bisa dilanjutkan. Selain itu peran pemerintah daerah juga minim dalam pengawasan penyaluran KUR, Hal ini terjadi karena kurangnya peninjauan langsung pemerintah terhadap usaha dari pelaku penerima KUR itu sendiri. Padahal program KUR merupakan program pemerintah pusat dalam rangka menyediakan akses permodalan bagi usaha-usaha kecil yang belum *bankable* atau usaha-usaha yang belum memenuhi persyaratan Bank.

Kebijakan Program KUR berpengaruh terhadap kesejahteraan target sasaran

Berdasarkan wawancara dengan informan bahwa anfaat penggunaan kredit KUR sangat dirasakan oleh penerima kredit KUR, karena dapat mengembangkan usahanya dan tidak bergantung dengan kontributor lagi. Sebagai contoh pedagang pala, yang biasanya mengambil dana dari pengepul besar sehingga dia tidak bisa menjual ke tempat lain dengan adanya modal KUR bisa menjual kemana saja dengan harga yang besar.

Jika jika mengacu pada aturan yang sudah ditentukan serta penyaluran program yang tepat sasaran, maka program KUR sesungguhnya bermanfaat bagi target sasaran untuk perbaikan taraf kesejahteraannya. Bagi pelaku UMKM, manfaat KUR adalah untuk membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Sementara bagi pemerintah, manfaat KUR adalah tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dalam rangka membantu UMKM sehingga meningkatkan usaha dan kesejahteraan ekonomi.

B. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Dalam implementasi kebijakan, manfaat yang dihasilkan oleh target sasaran (*target groups*) harus diperhatikan. KUR sendiri diperuntukkan untuk membantu pembiayaan yang dibutuhkan oleh UMKM untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Sedangkan bagi pemerintah, manfaat KUR adalah tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dalam rangka membantu UMKM sehingga meningkatkan usaha dan kesejahteraan ekonomi.

Program KUR diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin berwirausaha dari usaha kecil dan menengah. Pemerintah bekerja sama dengan beberapa jumlah bank di Indonesia dengan tingkat suku bunga yang berbeda di tiap banknya. Namun tidak semua bank di Indonesia yang dapat menyalurkan kredit usaha rakyat. Peranan UMKM dalam perekonomian indonesia adalah sentral, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang dirasa belum maksimal. Demikian juga kebijakan yang diambil yang cenderung berlebihan namun tidak efektif, sehingga kebijakan menjadi kurang komperatif, kurang terarah, serta bersifat tambal-sulam. Dengan program KUR ini diharapkan masalah akses permodalan yang dihadapi pelaku UMKM bisa teratasi.

Manfaat kebijakan Program KUR terhadap target sasaran

Dari wawancara dengan Bapak Rahmatullah PGS Kepala Unit BRI Thumburuni, program KUR dirasakan cukup membantu para pelaku UMKM di Kabupaten Fakfak mulai dengan berkembangnya usaha-usaha kecil. Berikut wawancara yang peneliti rangkum bahwa kebijakan kredit KUR dari segi manfaat memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja.

Menurut peneliti, pelaksanaan sosialisasi harus sering dilaksanakan agar Program KUR bisa dipahami oleh semua pihak dan tidak menganggap program KUR sebagai sesuatu yang nantinya bakal rumit seperti pinjaman Bank lain. Program KUR diperuntukan bagi masyarakat yang ingin berwirausaha atau mengembangkan usahanya.

Manfaat program KUR sendiri yang diperuntukan untuk membantu pembiayaan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha sektor UMKM telah dirasakan oleh warga masyarakat Fakfak yang memiliki usaha-usaha produktif UMKM.

C. Bagaimana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan

Dalam penerapan suatu kebijakan, ada sebuah perubahan yang diinginkan dari penerapan kebijakan tersebut. Dari penerapan program KUR yang dilakukan pemerintah ada suatu tujuan (*goal point*) yang ingin dicapai.

Bentuk perubahan yang dihasilkan setelah pelaksanaan Program KUR

Dalam setiap pelaksanaan program, tentunya memiliki target atau tujuan yang ingin dicapai untuk mengukur tingkat keberhasilan dari suatu program, Program KUR juga memiliki target yang ingin dicapai (*goal point*) untuk mengukur berhasil tidaknya penerapan program KUR tersebut.

Penerapan program KUR di Kabupaten Fakfak juga diharapkan memberikan perubahan yang lebih baik, baik dari segi perekonomian, tingkat kesejahteraan. Dari Wawancara dengan Bapak Rahmatullah PGS kepala Unit BRI Thumburuni, peneliti mendapatkan informasi bahwa sejak diluncurkan pada 2007, program KUR belum memberikan dampak perubahan yang signifikan, artinya perubahan yang ada baru sebatas berkembangnya usaha-usaha kecil di wilayah Fakfak. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa : diharapkan setelah penyaluran kredit KUR, UMKM akan berkembang ke bisnis Ritel dan penyaluran pembiayaan yang dikucurkan pemerintah tepat sasaran.

Penerapan program KUR diharapkan memberikan perubahan yang lebih baik, baik dari segi perekonomian, tingkat kesejahteraan. Akan tetapi, sejak diterapkannya Program KUR pada 2007, perubahan yang menjadi harapan pemerintah belum terwujud.

Berdasarkan uraian dari hasil wawancara diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa, hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti kurang tepatnya sasaran penyaluran KUR. Ke depan diharapkan bahwa program KUR membawa perubahan signifikan bagi kelangsungan usaha-usaha kecil dan mikro serta membawa manfaat bagi masyarakat.

D. Apakah letak sebuah program sudah tepat

Dalam penerapan sebuah kebijakan seringkali ada sebuah pertanyaan “apakah letak sebuah program/kebijakan sudah tepat?”. Dalam program kredit Usaha Rakyat (KUR)

tepat atau tidaknya program ini dilaksanakan adalah dengan melihat sejarah mana manfaat, tujuan serta perubahan yang diharapkan terlaksana.

Program KUR bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan

Program KUR merupakan program yang diharapkan dan ditunggu oleh para pelaku UMKM, yang selama ini kesulitan dalam mengakses permodalan karena usaha mereka belum memenuhi persyaratan bank. Pemerintah merencanakan program KUR untuk dijangkau oleh seluruh pelaku UMKM dengan persyaratan yang mudah dan suku bunga yang rendah. Tujuannya jelas agar program KUR ini bisa memajukan usaha-usaha sektor riil, meningkatkan taraf hidup pelaku usahanya.

Program KUR merupakan upaya yang baik dari pemerintah sebagai bagian dari usaha pemerintah meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dalam hal ini masyarakat menengah kebawah. Sejauh ini memang pengawasan pemerintah sudah dilaksanakan tetapi sebaiknya pengawasan terhadap program KUR diperketat karena dikhawatirkan malah dimanfaatkan oleh pihak yang sebenarnya tidak membutuhkan dana KUR tersebut.

Pengaruh program KUR terhadap peningkatan perekonomian

Program penyaluran KUR untuk pengembangan usaha rakyat oleh pemerintah bekerjasama dengan perbankan merupakan langkah yang positif dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan sebagai pondasi perekonomian daerah. Program KUR ini sekaligus menunjukkan masih cukup besarnya komitmen pemerintah terhadap kehidupan masyarakat bawah yang umumnya menggantungkan hidup dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) atau juga dapat disebut usaha rakyat.

Usaha kecil ini tersebar hampir di segala bidang kehidupan masyarakat, seperti bidang pertanian, penggalian, industri pengolahan, dan air minum, kontruksi, perdagangan eceran, akomodasi makan dan minuman, transportasi dan komunikasi, perantara keuangan, persewaan, kesehatan serta kegiatan sosial.

Untuk membangun dan mengembangkan usaha kecil ini sangat diperlukan berbagai kebijakan, mengingat banyaknya permasalahan yang dihadapinya dalam melakukan kegiatan usaha. Penyediaan modal dengan kegiatan usaha.

Dari wawancara dengan Bapak Rahmatullah PGS Kepala Unit BRI Thumburuni, penelitian mendapatkan pernyataan sebagai berikut: “program penyaluran kredit KUR untuk pengembangan usaha rakyat oleh pemerintah, bekerja sama dengan perbankan, merupakan suatu langkah positif dalam upaya mempercepat pembangunan daerah ekonomi kerakyatan sebagai sebagai pondasi perekonomian daerah. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang karena untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harusnya bersama-sama mengambil inisiatif

pembangunan daerah. Dengan adanya program KUR hendaknya pemerintah daerah ikut mendorong pengembangan usaha-usaha daerah dan turut memfasilitasi usaha-usaha kecil yang ada agar mendapatkan fasilitas pembiayaan dari KUR.

E. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik. Ketika sebuah program berjalan, sebenarnya sudah jelas siapa yang akan menjalankan program berjalan, seharusnya sudah yang akan secara langsung turun ke lapangan untuk memastikan program tersebut berjalan, seharusnya sudah jelas siapa yang akan menjalankan program tersebut dan siapa yang akan secara langsung turun ke lapangan untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik.

Bagaimana peran pelaksana program dalam sosialisasi KUR?

Tahun 2007, ketika program KUR mulai berjalan, pemerintah sudah menunjuk langsung Bank pelaksana yang akan melaksanakan program yang dicetuskan pemerintah tersebut. Program penyaluran KUR untuk pembangunan usaha rakyat oleh pemerintah bekerjasama dengan perbankan merupakan langkah yang positif dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan sebagai pondasi perekonomian daerah. Keberhasilan suatu program dapat diukur dari seberapa jauh tingkat sosialisasi yang dilaksanakan. Sebagai Bank pelaksana, selain bertugas menyalurkan kredit juga memiliki tugas untuk sosialisasi tentang program KUR, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rahmatullah PGS Kepala Unit BRI Thumburuni bahwa pemerintah pernah melakukan sosialisasi bersama Mantri KUR dan pelaku usaha/kelompok-kelompok usaha, bahwa dalam setiap implementasi sebuah program, sosialisasi merupakan faktor yang penting yang menjadi penentu berhasil tidaknya suatu program. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, terbukti bahwa sosialisasi sering dilakukan di pasar-pasar maupun di kampung-kampung dengan adanya pelaku penerima KUR sampai ke daerah terkecil. Oleh karena itu dengan adanya sosialisasi mengenai program KUR semakin bertambah dan menjadi penentu keberhasilan sebuah program.

Seperti apa pelaksana program melaksanakan program KUR?

Dalam pelaksanaan program KUR ini ada tiga pilar penting: 1) pemerintah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan keuangan, Pertanian, Kehutanan, kelautan dan Perikanan, Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Pemerintah berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian berikut pinjaman kredit. 2) Lembaga penjaminan yang berfungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaan yang

disalurkan oleh perbankan; 3) Perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM.

Pihak Bank pelaksana, BRI bertugas dalam penyaluran KUR di daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rahmatullah PGS Kepala Unit BRI Thumburuni, peneliti mendapatkan pernyataan bahwa “tugas sebagai mantri KUR adalah mengedukasi membina meyakinkan para nasabah dan calon nasabah bahwa kredit KUR adalah program pemerintah yang disalurkan melalui bank dalam bentuk kredit dengan bunga yang sangat ringan dan lebih baik dari berhutang kepada lintah darat/Koperasi.

Pelaksanaan Program KUR sudah berjalan dengan baik di Kabupaten Fakfak, karena baik pelaksana dituntut untuk dapat melaksanakan program dengan baik.

F. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya materi (*material resources*) dan sumberdaya metode (*method resources*). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.

Sebagai pelaksana kebijakan apakah sumberdaya yang dimiliki sudah memadai untuk pelaksanaan program KUR

Sebagai salah satu bank pelaksana, BRI seperti di ungkapkan oleh Bapak Rahmatullah PGS Kepala Unit BRI Thumburuni, peneliti mendapatkan pernyataan sebagai berikut: “dari sumberdaya yang ada sebagai bank pelaksana, sudah siap dalam pelaksanaan KUR dan berharap ikut membantu membangun perekonomian di kota Fakfak.”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan mantri yang membidangi penyaluran KUR pada Bank BRI Unit Thumburuni Bapak Safri Sanaky, Ibu Febby Patty dengan Bapak Ramli, menurutnya: “dari segi SDM saya rasa sudah siap untuk menjalankan program Kredit KUR.” Jadi dapat diketahui bahwa sebagai bank pelaksana, BRI sudah siap menjalankan program KUR tersebut.

Bekal apa yang diberikan kepada bawahan dalam pelaksanaan program KUR

Peningkatan sumberdaya mutlak dilakukan oleh pelaksanaan, hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan KUR selalu berjalan baik. Seperti di ungkapkan oleh Bapak Rahmatullah PGS Kepala Unit BRI Thumburuni, bahwa di tempatnya selalu mengedepankan perbaikan dari segala sumberdaya yang ada. Motivasi dan aturan harus kita jalankan bersama agar kredit KUR tersalurkan dengan baik dan tepat sehingga target yang diberikan pemerintah bisa tercapai (Hasil wawancara). Bisa dilihat dengan upaya-upaya dilaksanakan untuk meningkatkan sumberdaya-sumberdaya yang ada. Termasuk sumberdaya manusia.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa penyaluran KUR belum sepenuhnya tepat sasaran. Periode 2018 hasil audit internal BRI mencatat bahwa ada 15 penyaluran KUR yang tidak tepat sasaran (Sumber Audit Internal BRI). Sementara dari temuan di lapangan penyaluran KUR banyak diserap bukan untuk sektor usaha produktif. Jika mengacu pada aturan yang sudah ditentukan serta penyaluran program yang tepat sasaran, program KUR sesungguhnya bermanfaat bagi target sasaran untuk perbaikan taraf kesejahteraannya. Berdasarkan temuan di lapangan terdapat terdapat beberapa kasus mengenai dana KUR turun pada yang bukan semestinya atau yang bukan pada usaha produktif seperti yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Temuan di lapangan, ada beberapa kasus dana KUR dipergunakan bukan sebagai tambahan modal usaha. Hal ini sebenarnya yang membuat program KUR kurang begitu optimal dirasakan oleh pelaku usaha.

Sebenarnya, tujuan dari program KUR adalah memajukan usaha-usaha sektor riil, serta meningkatkan taraf hidup pelaku usahanya. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harusnya bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Dengan adanya program KUR hendaknya pemerintah daerah ikut mendorong pembangunan usaha-usaha daerah dengan turut memfasilitasi usaha-usaha kecil yang ada agar mendapatkan fasilitas pembiayaan dari KUR.

Keberhasilan suatu program dapat diukur dari seberapa jauh tingkat sosialisasi yang dilaksanakan. Sosialisasi merupakan faktor yang penting yang menjadi penentu berhasil tidaknya suatu program. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sosialisasi program KUR tidak hanya menjadi peran dari bank pelaksana, tetapi juga merupakan peran dari pemerintah daerah selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Minimnya peran pemerintah daerah dalam pengawasan kepada bank pelaksana dan memberikan sosialisasai kepada masyarakat sehingga tujuan dari penerapan program KUR tersebut tidak tepat sasaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan sebelumnya tentang masalah dan temuan-temuan di lapangan mengenai penelitian “Implementasi Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Dalam Mengembangkan Usaha Kecil (Studi PT.Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk. Unit Thumburuni, Kelurahan, Fakfak Selatan, Kab.Fakfak), peneliti mendapatkan kesimpulan akhir bahwa implementasi kebijakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam pengembangan usaha kecil di Kabupaten Fakfak belum optimal.

Kemudian mengacu pada permasalahan dan pertanyaan yang ada pada rumusan masalah maka disimpulkan sebagai berikut: (1) implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dipahami sebagai tindakan yang dilakukan melalui mekanisme penyaluran KUR dari pemerintah, kemudian perusahaan penjamin kredit, selanjutnya bank pelaksana, dan terakhir kepada pelaku UKM/debitur KUR. Implementasi program KUR telah berhasil membantu meningkatkan kemampuan masyarakat yang memiliki embrio usaha dalam memanfaatkan usaha yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Adapun proses Implementasi dalam bentuk tahapan pengajuan KUR yaitu calon debitur melakukan permohonan kredit, kemudian pihak bank melakukan peninjauan dan analisis kredit (tahap pemeriksaan), selanjutnya pemberian putusan dan pencairan kredit. (2) minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik ditingkat kecamatan maupun pada instansi terkait sebenarnya bisa lebih mengoptimalkan program KUR yang sedang berjalan. Hanya saja hal ini tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. (3) minimnya peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program KUR seringkali nasabah KUR khususnya pelaku usaha mengajukan pinjaman tanpa diketahui pihak pemerintah daerah. Padahal berdasarkan tujuan dilaksanakannya program KUR salah satunya adalah untuk meningkatkan perekonomian di daerah dengan cara pemberdayaan usaha-usaha mikro kecil serta menengah yang dalam usahanya mengedepankan potensi daerah masing-masing. (4) penyaluran KUR belum sepenuhnya tepat sasaran. Periode 2018 hasil Audit Internal BRI bahwa ada 15 penyaluran KUR yang tidak tepat sasaran (Sumber Audit Internal BRI). Penyaluran KUR banyak diserap bukan untuk sektor usaha produktif, seperti dipergunakan bukan sebagai tambahan modal usaha produktif. Hal ini sebenarnya yang membuat program KUR kurang begitu optimal dirasakan oleh pelaku usaha.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran agar implementasi program KUR berjalan optimal sehingga membantu dalam perkembangan usaha kecil di Kabupaten Fakfak, saran tersebut sebagai berikut: (1) mengoptimalkan sosialisasi mengenai program KUR baik oleh bank pelaksana maupun oleh pemerintah daerah yang merupakan fasilitator masyarakat dalam pengajuan pembiayaan KUR. Sosialisasi yang dilakukan harus menyeluruh agar masyarakat memahami keseluruhan maksud dan tujuan program KUR. (2) penguatan kerjasama antara Bank pelaksana

dengan pemerintah daerah agar terciptanya sinergis pengelolaan program KUR sehingga meminimalisir penyelewengan dan tidak tepat sasaran dari program KUR itu sendiri. (3) memperketat pengawasan dari pemerintah terkait penyaluran KUR sehingga tidak ada lagi dana KUR yang turun kepada yang tidak berhak menerimanya. (4) mengoptimalkan tenaga pendampingan dari pemerintah daerah melalui instansi terkait terhadap usaha-usaha kecil di daerahnya sehingga nantinya terdata siapa-siapa yang telah menerima dana KUR. (5) mengkaji kembali persyaratan pengajuan KUR sehingga lebih meningkatkan pelaku usaha kecil dalam memperoleh bantuan usaha dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. Chaedar. 2006. Pokoknya Kualitatif. Jakarta : Pustaka
- Anderson, James E., 1975. Public Policy Making, New York : Holt
- Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan. Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Putra Grafika
- Dunn, William N., 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik.. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Fischer, Gerald J. Miller, and Mara S. Sidney (eds). 2007. *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. Boca Raton: CRS Press.
- Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn, 1978, Policy Analysis for the Real World, Oxford University Press
- Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta : Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI.
- Islamy, Irfan. 1991. Prinsip-prinsip perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda

- Muluk, Khairul. 2005. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang : Bayumedia Publishing.
- Nasution, S. 1988. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung : Tarsito
- Norman , Andika, (2010) *Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di Puskesmas Jagir Surabaya*. Undergraduate thesis, UPN "Veteran" JATIM.
- Novayanti, 2013, Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah Di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Enrekang, Universitas Hasanuddin, Makassar : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin
- Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi,. Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta : Grasindo
- Sastropetro, Santoso. 1990. Pendapat Publik, Pendapat Umum, dan Pendapat Khalayak Dalam Komunikasi Sosial. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soehartono, Irawan, 2002. Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sumarno. 1990. Pendapat Umum Dalam Sistem Politik. Bandung : Citra.
- Sunarjo, Djoenasih S. 1984. Opini Publik. Yogyakarta : Liberty
- Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah. Daerah. Bandung : Alfabeta
- Wicaksono. 2006. Model Pengelolaan Kawasan Wisata Budaya Terungan Kajian Melalui Perspektif *Culture Resource Management*. Tesis. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo.

....., Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

<http://repository.fisip-untirta.ac.id/394/1/SKRIPSI%202.pdf> (diakses pada tanggal 8
Agustus 2018 Jam 18.00 WIT)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Fakfak

https://fakfakkab.go.id/?page_id=197